

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini mengadaptasi penelitian yang dilakukan oleh Barros (2007) yang dimuat dalam *International Journal Public Sector Performance Management, Vol. 1, No. 1* tahun 2007. Penyesuaian terhadap model dilakukan dengan mempertimbangkan konteks penelitian yang berbeda dan ketersediaan data. Metode penelitian dalam hal ini dimaksudkan sebagai langkah yang sistematis untuk mengumpulkan bahan dan fakta yang akan dianalisis dan sebagai pembuat kesimpulan atas objek penelitian. Metode penelitian dibutuhkan agar langkah-langkah menuju pemecahan masalah dalam penelitian dapat dilakukan secara jelas dan terarah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) yang berada di Pulau Jawa . KPP Pratama yang diteliti berjumlah 157 kantor, dengan rincian selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1. Dalam penelitian ini, KPP Pratama dikategorikan sebagai DMU yang homogen. Asumsi homogenitas dari DMU ini, berdasarkan hal-hal berikut ini :

- KPP Pratama merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (tingkat eselon III) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
- KPP Pratama memiliki kesamaan sumber daya dan teknologi yang digunakan.
- KPP Pratama memiliki kesamaan tujuan (*obyektif*) yang akan dicapai sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.
- KPP Pratama memiliki kesamaan tugas (*task*) dan fungsi (*function*).
- KPP Pratama memiliki kesamaan karakteristik operasional lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan demikian seluruh KPP Pratama tersebut dapat memenuhi persyaratan sebagai DMU, yaitu harus merupakan unit-unit yang homogen. Seluruh KPP Pratama melakukan tugas (*task*) dan menyelenggarakan fungsi (*function*) yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 yang telah direvisi terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Jumlah seluruh KPP Pratama di Pulau Jawa sebanyak 164 kantor yang tersebar di empat belas Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak. Masalah ketidakterdediaan data secara lengkap, membuat penulis tidak dapat melakukan analisis secara keseluruhan. Ada tujuh KPP Pratama yang datanya tidak lengkap, sehingga proses analisis hanya dilakukan terhadap 157 kantor. Namun, hal ini tidak mengurangi tujuan dari penelitian ini. Berikut ini nama-nama KPP Pratama yang tidak diikutsertakan dalam analisis :

1. KPP Pratama Semarang Candisari - Kanwil DJP Jawa Tengah I
2. KPP Pratama Demak- Kanwil DJP Jawa Tengah I
3. KPP Pratama Blora - Kanwil DJP Jawa Tengah I
4. KPP Pratama Semarang Gayamsari - Kanwil DJP Jawa Tengah I
5. KPP Pratama Batang - Kanwil DJP Jawa Tengah I
6. KPP Pratama Surabaya Mulyorejo - Kanwil DJP Jawa Timur I
7. KPP Pratama Madiun - Kanwil DJP Jawa Timur II

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu :

- Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari beberapa literatur ilmiah, seperti buku, jurnal, majalah, karya tulis, skripsi, tesis, disertasi, media *online internet*, *intranet* Direktorat Jenderal Pajak dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan objek penulisan.

- Studi Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian lapangan, yaitu melakukan komunikasi dan mengajukan permohonan permintaan data kepada pihak-pihak yang dalam tugas/jabatannya berkaitan dengan objek penelitian ini. Pihak-pihak yang terkait antara lain Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat-Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan-Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan-Direktorat Jenderal Pajak, dan Sekretariat Direktorat Jenderal-Direktorat Jenderal Pajak.

3.4 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder tahun 2008 yang diperoleh dari media *internet*, *intranet* Direktorat Jenderal Pajak dan diperoleh langsung dari sumber berikut ini :

- Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat - Direktorat Jenderal Pajak
- Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan - Direktorat Jenderal Pajak
- Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan - Direktorat Jenderal Pajak
- Sekretariat Direktorat Jenderal - Direktorat Jenderal Pajak

Data yang berhasil dihimpun/dikumpulkan untuk penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 2 dan Lampiran 3.

3.5 Pemilihan Variabel Penelitian

Pemilihan variabel dalam studi efisiensi secara signifikan akan mempengaruhi hasilnya. Adanya keterbatasan dalam penyeleksian variabel karena reliabilitas dari data yang diperoleh merupakan kendala yang bisa terjadi. Sejauh ini tidak ada aturan yang spesifik dalam menentukan pemilihan variabel *input* dan *output*. Namun demikian, Ramanathan (2003) dan Sufian (2006) telah memberikan beberapa pedoman dalam pemilihan variabel *input* dan *output*. Menurut-nya, studi atau pendekatan DEA sebaiknya dimulai dengan daftar *input*

dan *output* yang komprehensif dan dipertimbangkan relevan terhadap studi yang dilakukan.

Umumnya variabel *input* didefinisikan sebagai sumber daya yang dimanfaatkan oleh DMU atau kondisi yang mempengaruhi kinerja dari DMU, sementara variabel *output* merupakan keuntungan (*benefit*) yang dihasilkan sebagai hasil dari kegiatan operasi DMU. Penulis secara selektif memilih variabel *input* dan *output* dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Variabel *input* dan *output* yang digunakan setidaknya merupakan komponen yang tercakup dalam *Key Performance Indicator* (KPI), yaitu indikator yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai indikator kinerja instansi vertikalnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 18/PJ./2006, tanggal 27 Juli 2006 tentang *Key Performance Indicator* (KPI).
- Variabel *input* dan *output* yang digunakan merupakan komponen yang mempengaruhi kinerja KPP Pratama.
- Variabel *input* dan *output* yang mencirikan kinerja dari masing-masing KPP Pratama bersifat identik.
- Keterbatasan data karena belum adanya standar pengukuran kinerja terhadap KPP Pratama.

Jumlah keseluruhan variable *input* dan *output* yang digunakan dan menjadi proksi dari penelitian ini sebanyak tiga belas, dengan rincian sebagai berikut :

Variabel *Input* :

- Jumlah Pegawai
Merupakan Sumber Daya Manusia yang melakukan tugas-tugas di KPP Pratama yang meliputi seluruh pegawai dari tingkat pelaksana sampai pimpinan (kepala kantor). Data mengenai Jumlah Pegawai bersumber dari *intranet* Kepegawaian Direktorat Jenderal Pajak yang dapat diakses pada alamat <http://10.254.236.81/welcome/>. Pemilihan Jumlah Pegawai sebagai variabel *input* karena merupakan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing KPP Pratama yang dapat mempengaruhi kinerja. Hal-hal yang menyangkut kepegawaian seperti jumlah pegawai, kebijakan rekrutmen,

penempatan, mutasi dan promosi merupakan wewenang kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga Jumlah Pegawai yang ada di KPP Pratama merupakan *given* (sudah ditentukan). Tanpa adanya Sumber Daya Manusia (SDM), tentu kegiatan operasional kantor tidak dapat berjalan. Dengan pertimbangan tersebut, maka Jumlah Pegawai dipilih sebagai variabel *input*.

- Jumlah Anggaran

Merupakan jumlah anggaran operasional yang dialokasikan ke masing-masing KPP Pratama untuk kegiatan operasional tahun 2008 yang bersumber dari APBN. Anggaran operasional yang digunakan ini adalah Mata Anggaran Keluaran (MAK) 51 mengenai belanja pegawai (gaji dan seluruh jenis tunjangan), MAK 52 mengenai belanja barang, dan MAK 53 mengenai belanja modal. Data mengenai Jumlah Anggaran diperoleh dari Bagian Keuangan, yang secara struktural berada di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak. Pemilihan Jumlah Anggaran sebagai variabel *input* karena merupakan komponen penunjang untuk kegiatan operasional masing-masing KPP Pratama. Jumlah anggaran yang dialokasikan kepada masing-masing KPP Pratama telah ditentukan kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, melalui Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga bersifat *given* (sudah ditentukan). Tanpa adanya anggaran (dana), tentu kegiatan operasional kantor tidak dapat berjalan. Dengan pertimbangan tersebut, maka Jumlah Pegawai dipilih sebagai variabel *input*.

- Jumlah WP OP

Merupakan jumlah Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) yang terdaftar di *master file* masing-masing KPP Pratama tahun 2008 yang memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama. Data mengenai Jumlah WP OP diperoleh dari data *Key Performance Indicator* (KPI) yang terdapat pada *intranet* (portal DJP) Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi KPI dapat dilihat di <http://portaldjp/Aplikasi/Data%20Unit%20Kerja/Aplikasi%20Key%20Performance%20Indic/Pages/default.aspx>.

Pemilihan Jumlah WP OP sebagai variabel *input* karena Jumlah Wajib Pajak yang ada pada tahun pengamatan, pada umumnya merupakan bawaan dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya data itu sudah ada di tahun pengamatan. Kalaupun ada penambahan jumlah Wajib Pajak di tahun pengamatan, pada umumnya lebih banyak karena kesadaran Wajib Pajak sendiri seperti adanya keinginan melakukan usaha atau pekerjaan bebas, keinginan agar bebas Fiskal Luar Negeri dan lain sebagainya. Kondisi ini didukung dengan sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem *self assessment*. Jumlah Wajib Pajak yang memang secara murni lebih banyak karena merupakan hasil kinerja pegawai pajak adalah Wajib Pajak yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil kegiatan ekstensifikasi. Untuk kelompok Wajib Pajak ini (Jumlah WP Ekstensifikasi), penulis telah menentukan sebagai variabel *output*. Jumlah WP OP menurut hemat penulis lebih menunjukkan sumber daya yang dimiliki oleh KPP Pratama, dimana Jumlah WP OP merupakan *proxy* dari *output* Total Penerimaan Pajak dan Jumlah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang disampaikan. Dengan pertimbangan tersebut, maka Jumlah WP OP dipilih sebagai variabel *input*.

- Jumlah WP Badan

Merupakan jumlah Wajib Pajak (WP) Badan yang terdaftar di *master file* masing-masing KPP Pratama tahun 2008 yang memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama. Data mengenai Jumlah WP Badan diperoleh dari data *Key Performance Indicator* (KPI) yang terdapat pada *intranet* (portal DJP) Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak. Pemilihan Jumlah WP Badan sebagai variabel *input* karena Jumlah Wajib Pajak yang ada pada tahun pengamatan, pada umumnya merupakan bawaan dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya data itu sudah ada di tahun pengamatan. Kalaupun ada penambahan jumlah Wajib Pajak di tahun pengamatan, pada umumnya lebih banyak karena kesadaran Wajib Pajak sendiri seperti adanya keinginan melakukan usaha yang bersifat komersial dalam bentuk badan hukum (PT, CV, Firma, yayasan, koperasi) maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha komersial seperti partai politik (parpol). Kondisi ini didukung dengan sistem perpajakan

Indonesia yang menganut sistem *self assessment*. Jumlah WP Badan menurut hemat penulis lebih menunjukkan sumber daya yang dimiliki oleh KPP Pratama, dimana Jumlah WP Badan merupakan *proxy* dari *output* Total Penerimaan Pajak dan Jumlah SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan. Dengan pertimbangan tersebut, maka Jumlah WP Badan dipilih sebagai variabel *input*.

- Jumlah PKP

Merupakan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di *master file* masing-masing KPP Pratama tahun 2008 yang memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama, khususnya jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PKP terdiri dari PKP Orang Pribadi dan PKP Badan yang merupakan bagian dari Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Jumlah Wajib Pajak Badan. Sebaliknya Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan belum tentu semuanya merupakan PKP. Untuk dikukuhkan sebagai PKP diperlukan persyaratan khusus yang harus dipenuhi seperti barang dan jasa yang diserahkan merupakan barang atau jasa kena pajak dan memiliki batasan omset atau peredaran usaha tertentu. Mengutip istilah dalam matematika, dapat diartikan bahwa Jumlah PKP merupakan bagian irisan atau bagian yang bersinggungan dengan dua himpunan (Jumlah WP OP dan Jumlah WP Badan). Data mengenai Jumlah PKP juga diperoleh dari data *Key Performance Indicator* (KPI) yang terdapat pada *intranet* (portal DJP) Direktorat Jenderal Pajak. Pemilihan Jumlah PKP sebagai variabel *input*, karena Jumlah PKP yang ada pada tahun pengamatan, pada umumnya merupakan bawaan dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya data itu sudah ada di tahun pengamatan. Kalaupun ada penambahan jumlah PKP di tahun pengamatan, pada umumnya lebih banyak karena kesadaran Wajib Pajak sendiri sesuai sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem *self assessment*. Jumlah PKP menurut hemat penulis lebih menunjukkan sumber daya yang dimiliki oleh KPP Pratama, dimana Jumlah PKP merupakan *proxy* dari *output* Total Penerimaan Pajak dan Jumlah SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disampaikan. Dengan pertimbangan tersebut, maka Jumlah PKP dipilih sebagai variabel *input*.

- Jumlah NOP

Merupakan jumlah Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NOP PBB) yang terdaftar di *master file* masing-masing KPP Pratama tahun 2008 dan memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak, khususnya jenis Pajak Bumi dan Bangunan) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Data mengenai Jumlah NOP diperoleh dari data *Key Performance Indicator* (KPI) yang terdapat pada *intranet* (portal DJP) Direktorat Jenderal Pajak. Pemilihan Jumlah NOP sebagai variabel *input* karena Jumlah NOP yang ada pada tahun pengamatan, pada umumnya merupakan bawaan dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya data itu sudah ada di tahun pengamatan. Kalaupun ada penambahan jumlah NOP di tahun pengamatan, tidak terlalu signifikan dibanding dengan Jumlah NOP yang sudah ada. Jumlah NOP menurut hemat penulis lebih menunjukkan sumber daya yang dimiliki oleh KPP Pratama yang merupakan *proxy* dari *output* Total Penerimaan Pajak dan Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB (SPPT PBB) dilunasi/dibayar. Dengan pertimbangan tersebut, maka Jumlah NOP dipilih sebagai variabel *input*

Variabel Output :

- Total Penerimaan Pajak

Merupakan jumlah penerimaan pajak tahun 2008 masing-masing KPP Pratama yang meliputi seluruh jenis pajak, termasuk pembayaran surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, dan pencairan/pembayaran tunggakan pajak. Data penerimaan pajak bersumber dari Modul Penerimaan Negara (MPN) yang diperoleh dari Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaan Pajak tahun 2008 yang bersumber dari MPN belum termasuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diperoleh dari data *Key Performance Indicator* (KPI) yang terdapat pada *intranet* (portal DJP) Direktorat Jenderal Pajak. Pemilihan Total Penerimaan Pajak sebagai variabel *output* karena merupakan hasil serangkaian kegiatan KPP Pratama (DMU) dari seluruh variabel *input* yang ada.

- **Jumlah SPT Tahunan OP**
Merupakan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2008 yang disampaikan Wajib Pajak Orang Pribadi kepada KPP Pratama di tahun 2009. Data mengenai Jumlah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi diperoleh dari data *Key Performance Indicator* (KPI) yang terdapat pada *intranet* (portal DJP) Direktorat Jenderal Pajak. Pemilihan Jumlah SPT Tahunan OP sebagai variabel *output* karena merupakan hasil serangkaian kegiatan KPP Pratama (DMU) dari variabel *input* Jumlah WP OP yang terdaftar, terutama Wajib Pajak yang efektif. Jumlah WP OP merupakan *proxy* dari *output* Jumlah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang disampaikan dan Total Penerimaan Pajak.
- **Jumlah SPT Tahunan Badan**
Merupakan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan tahun pajak 2008 yang disampaikan Wajib Pajak Badan kepada KPP Pratama di tahun 2009. Data mengenai Jumlah SPT Tahunan PPh Badan diperoleh dari data *Key Performance Indicator* (KPI) yang terdapat pada *intranet* (portal DJP) Direktorat Jenderal Pajak. Pemilihan Jumlah SPT Tahunan Badan sebagai variabel *output* karena merupakan hasil serangkaian kegiatan KPP Pratama (DMU) dari variabel *input* Jumlah WP Badan yang terdaftar, terutama Wajib Pajak yang efektif. Jumlah WP Badan merupakan *proxy* dari *output* Jumlah SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan dan Total Penerimaan Pajak.
- **Jumlah SPT Masa PPN**
Merupakan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN rata-rata yang disampaikan di tahun 2008. Data mengenai Jumlah SPT Masa PPN diperoleh dari data *Key Performance Indicator* (KPI) yang terdapat pada *intranet* (portal DJP) Direktorat Jenderal Pajak. Pemilihan Jumlah SPT Masa PPN sebagai variabel *output* karena merupakan hasil serangkaian kegiatan KPP Pratama (DMU) dari variabel *input* Jumlah PKP terdaftar, terutama PKP yang efektif. Jumlah PKP merupakan *proxy* dari *output* Jumlah SPT Masa PPN yang disampaikan dan Total Penerimaan Pajak.

- **Jumlah SPPT Dilunasi**
Merupakan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas seluruh jenis objek pajak PBB yang telah dilunasi untuk tahun pajak 2008. Data mengenai Jumlah SPPT yang telah dibayar/dilunasi diperoleh dari data *Key Performance Indicator* (KPI) yang terdapat pada *intranet* (portal DJP) Direktorat Jenderal Pajak. Pemilihan Jumlah SPPT Dilunasi sebagai variabel *output* karena merupakan hasil serangkaian kegiatan KPP Pratama (DMU) dari variabel *input* Jumlah NOP terdaftar, terutama NOP yang efektif. Jumlah NOP merupakan *proxy* dari *output* Jumlah SPPT yang dilunasi/dibayar dan Total Penerimaan Pajak.
- **Jumlah Pemeriksaan**
Merupakan jumlah penyelesaian pemeriksaan (*audit*) terhadap Wajib Pajak yang telah diselesaikan di tahun 2008. Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Data mengenai jumlah pemeriksaan pajak yang telah diselesaikan diperoleh dari data *Key Performance Indicator* (KPI) yang terdapat pada *intranet* (portal DJP) Direktorat Jenderal Pajak. Pemilihan Jumlah Pemeriksaan sebagai variabel *output* karena merupakan hasil serangkaian kegiatan KPP Pratama (DMU) dari variabel Jumlah Pegawai, terutama pegawai yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pemeriksaan.
- **Jumlah WP Ekstensifikasi**
Merupakan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi hasil kegiatan ekstensifikasi masing-masing KPP Pratama di tahun 2008 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 tanggal 25 Januari 2007 dan PER-116/PJ/2007 tanggal 29 Agustus 2007. Wajib Pajak yang ditetapkan dari kegiatan ekstensifikasi meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah dan melalui pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Data mengenai Jumlah Wajib Pajak hasil ekstensifikasi diperoleh dari data Pendaftaran Wajib Pajak Masal (PWPM) yang terdapat pada *intranet* (portal DJP) Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi PWPM dapat dilihat pada alamat berikut ini :

<http://portaldjp/Aplikasi/Data%20Unit%20Kerja/Monitoring%20PWPM/Pages/default.aspx>.

Pemilihan Jumlah WP Ekstensifikasi sebagai variabel *output* karena merupakan hasil serangkaian kegiatan KPP Pratama (DMU) dari variabel Jumlah Pegawai, terutama pegawai yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan ekstensifikasi atau *canvassing*.

3.6 Alat Bantu Analisis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa *software*, yaitu *Microsoft Excel*, SPSS 16, dan *Efficiency Measurement System (EMS)*. *Microsoft Excel* digunakan untuk melakukan pengelompokan data, modifikasi hasil *output* SPSS 16 dan EMS, serta proses pengolahan data lainnya. SPSS 16 digunakan untuk melakukan pengujian kelayakan variabel yang digunakan, pengujian korelasi antar variabel *input*, pengujian korelasi antar *output*, pengujian korelasi antar variabel *input* dengan variabel *output* dan analisis regresi dengan *Standardized coefficient*. EMS digunakan untuk menghitung nilai efisiensi masing-masing DMU (KPP Pratama) dengan metode DEA. *Software* ini dikembangkan oleh *University of Dortmund* dan didownload di <http://www.wiso.uni-dortmund.de/lsfg/or/scheel/ems/>.

3.7 Desain Penelitian

Secara garis besar, langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Mengidentifikasi variabel *input* dan *output* masing-masing KPP Pratama sekaligus menghimpun/mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Informasi mengenai variabel *input* dan *output* diperoleh dari data sekunder Direktorat Jenderal Pajak.
- Melakukan pengujian kecukupan *sampling* DMU (KPP Pratama).
- Melakukan pengujian variabel penelitian yang meliputi, pengujian kelayakan variabel, pengujian korelasi antar *input*, pengujian korelasi antar *output*, dan

pengujian korelasi variabel *input* terhadap variabel *output*. Seluruh pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan *software* SPSS 16 dan *Eviews*. 4.1.

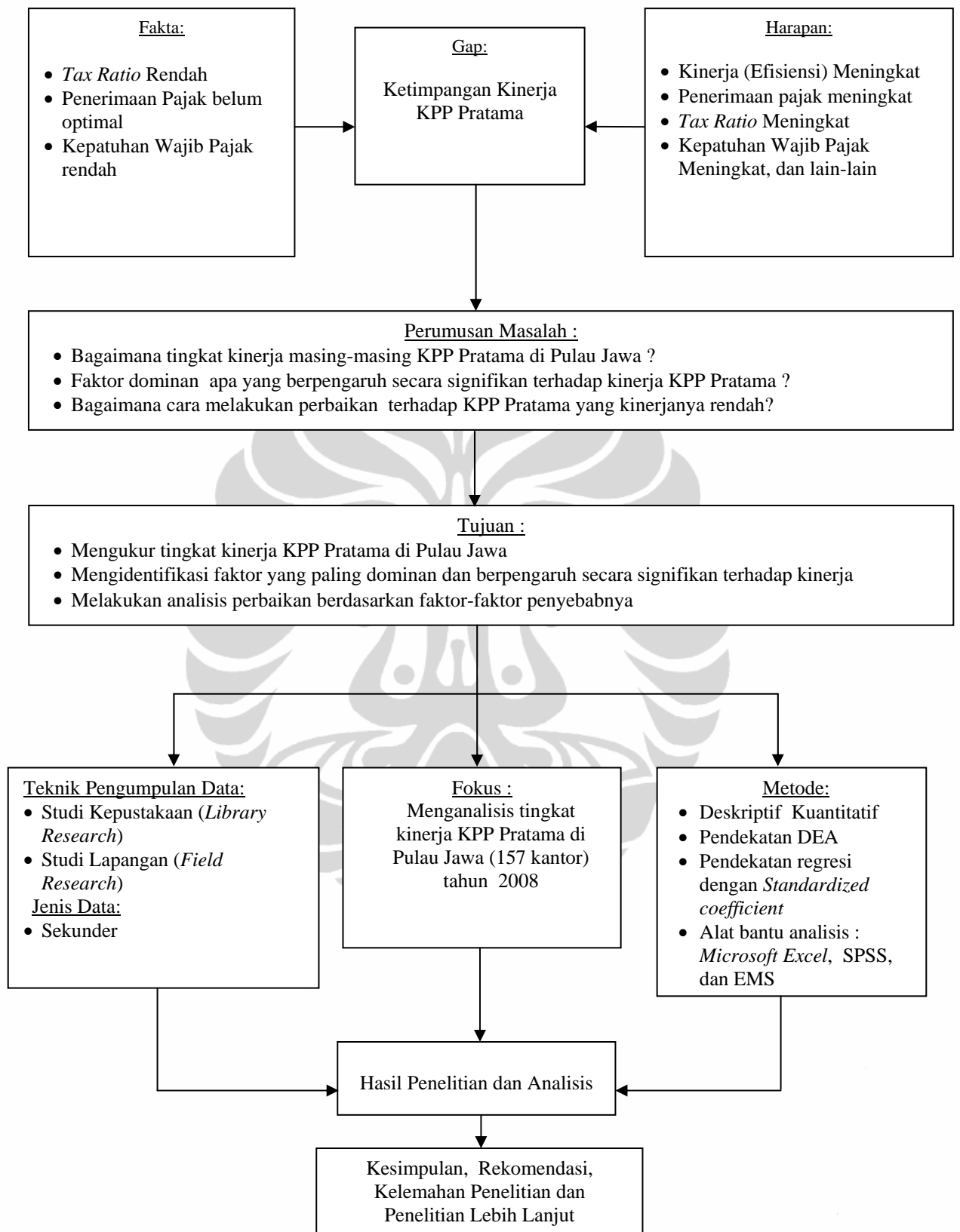
- Melakukan penghitungan/pengukuran efisiensi terhadap KPP Pratama melalui pendekatan DEA dengan bantuan *Software* EMS. Suatu KPP Pratama dikatakan efisien apabila skor efisiensinya 100% dan semakin tidak efisien (inefisien) apabila nilai efisiensinya lebih kecil dari 100%. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian pertama yaitu untuk mengukur tingkat kinerja KPP Pratama di Pulau Jawa.
- Melakukan analisis terhadap hasil penghitungan/pengukuran efisiensi. Dengan bantuan *software* EMS akan didapatkan nilai efisiensi masing-masing KPP Pratama. Selanjutnya berdasarkan nilai efisiensi yang telah dicapai setiap KPP Pratama, akan dilakukan pengelompokan dalam kelompok KPP Pratama yang efisien dan tidak efisien.
- Melakukan *benchmarking* bagi KPP Pratama yang tidak efisien. KPP Pratama yang tidak efisien dapat berpatokan (*benchmarks*) kepada KPP Pratama yang telah efisien, agar menjadi efisien.
- Selanjutnya melakukan analisis lebih lanjut terhadap hasil DEA, yaitu analisis sensitivitas dan analisis lebih lanjut terhadap skor efisiensi melalui analisis regresi dengan *Standardized coefficient*. Analisis sensitivitas dilakukan dengan memperhatikan apakah skor efisiensi dari suatu KPP Pratama berubah secara signifikan, jika mengabaikan satu *input* dalam analisis DEA atau mengeluarkan satu KPP Pratama yang efisien dalam analisis DEA.
- Langkah berikutnya adalah melakukan analisis regresi dengan *Standardized coefficient* untuk melihat pengaruh paling dominan dan signifikan dari seluruh variabel *input* yang digunakan terhadap efisiensi KPP Pratama. Langkah ini merupakan jawaban untuk tujuan penulisan yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi faktor paling dominan dan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja KPP Pratama di Pulau Jawa.
- Langkah terakhir adalah melakukan upaya perbaikan bagi KPP Pratama yang tidak efisien berdasarkan faktor-faktor penyebab tidak efisien. Kondisi tidak efisien dalam hal ini artinya KPP Pratama belum mencapai *output* secara maksimal dengan tingkat *input* yang ada. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi tujuan

penelitian ketiga, yaitu melakukan analisis perbaikan untuk pencapaian kinerja KPP Pratama di Pulau Jawa berdasarkan faktor-faktor penyebabnya.

3.8 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yang melandasi penelitian, dapat digambarkan dalam bentuk Bagan 3.1.





Bagan 3.1 Kerangka Berfikir